

# ANALISIS PERAN YAYASAN BAITUL MAL BRILiaN TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI ( STUDY KASUS PENERIMAN MANFAAT *MUSTAHIK INCOME GENERATING PROGRAM* DI DESA BRAJA CAKA KECAMTAN WAY JEPARA LAMPUNG TIMUR)

Edi Jatmiko

Pipit Afifah

STAI Darussalam Lampung

[mikogie1@gmail.com](mailto:mikogie1@gmail.com)

[afifahpipit091@gmail.com](mailto:afifahpipit091@gmail.com)

---

## Abstract / Abstrak

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di daerah pedesaan. Desa Braja Caka di Kabupaten Lampung Timur menjadi contoh nyata di mana masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian dan usaha mikro dengan pendapatan yang fluktuatif. Sebagai solusi, Yayasan Baitul Mal BRILiaN (YBM BRILiaN) meluncurkan program *Mustahik Income Generating Program (MIGP)*, sebuah inisiatif pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang menggabungkan bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*, melibatkan wawancara terhadap 10 penerima manfaat serta analisis dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MIGP berhasil meningkatkan pendapatan rata-rata mustahik sebesar Rp400.000 per bulan dan menciptakan ekosistem usaha yang kolaboratif melalui sistem bagi hasil dan pemasaran kolektif. Sebanyak 90% penerima menyatakan program ini lebih efektif daripada bantuan konsumtif, meskipun 10% masih mengalami kesulitan dalam memahami mekanismenya. Faktor keberhasilan utama meliputi keterbukaan terhadap inovasi, kedisiplinan pembukuan, dan pemanfaatan jaringan sosial. Tantangan yang dihadapi antara lain resistensi terhadap perubahan (15% penerima) dan variasi tingkat adopsi program. Rekomendasi strategis mencakup penyempurnaan modul pelatihan berbasis kebutuhan spesifik, penguatan kelembagaan kelompok usaha, dan integrasi dengan program pemerintah seperti KUR untuk memperluas dampak pemberdayaan.

---

## Kata kunci

Pemberdayaan  
Ekonomi  
Baitul Mal  
Mustahik

## A. Pendahuluan

Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, terutama di wilayah pedesaan. Desa Braja Caka di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu contoh nyata dimana masyarakatnya sangat bergantung pada sektor pertanian dan usaha mikro. Kondisi ini menimbulkan kerentanan ekonomi karena pendapatan yang fluktuatif dan tidak stabil.

Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Yayasan Baitul Mal Brilian (YBM Brilian) hadir dengan program *Mustahik Income Generating Program* (MIGP). Program ini dirancang khusus untuk memberdayakan mustahik melalui pendekatan syariah, berupa bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan berkelanjutan.

Secara historis, konsep Baitul Mal dalam Islam berfungsi sebagai pengelola dana sosial umat. Di era kontemporer, YBM Brilian mengadaptasi peran ini dengan tidak hanya melakukan distribusi dana konsumtif, tetapi juga mengembangkan program produktif. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada kemandirian dan keberlanjutan usaha.

Namun demikian, efektivitas program MIGP dalam meningkatkan taraf ekonomi mustahik di Desa Braja Caka masih memerlukan kajian mendalam. Beberapa isu krusial yang melatarbelakangi penelitian ini antara lain tingkat kemiskinan, ketergantungan masyarakat pada bantuan konsumtif, serta terbatasnya akses terhadap permodalan syariah.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis dampak program MIGP terhadap peningkatan pendapatan mustahik, perkembangan usaha, serta hambatan yang dihadapi. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga filantropi Islam dan pemerintah dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan. Selain itu, dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam terapan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

## **B. Kajian Teori**

### **Konsep Baitul MAL**

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan Islam yang berperan sebagai pengelola dana sosial umat, mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Secara historis, institusi ini mulai berkembang sejak masa Rasulullah SAW dan mencapai puncaknya di era Khulafaur

Rasyidin sebagai alat pemerataan ekonomi .<sup>1</sup>Di era modern, fungsi Baitul Mal telah berevolusi menjadi lebih dari sekedar penghimpun dana, melainkan juga berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan<sup>2</sup>.

Landasan operasional Baitul Mal bersumber dari QS At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan golongan penerima zakat, dengan penekanan pada pendekatan pemberdayaan. Baitul Mal kontemporer harus memadukan tiga unsur utama: kesesuaian syariah, transparansi pengelolaan, dan dampak sosial yang terukur. Contoh nyata dapat dilihat pada Baitul Mal Wilayah Persekutuan Malaysia yang berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat melalui digitalisasi dan audit syariah.

Secara fungsional, Baitul Mal memiliki peran krusial dalam: (1) pengalokasian dana untuk jaminan sosial, (2) penyaluran dana produktif untuk usaha mikro, dan (3) pemulihan ekonomi di masa krisis di Indonesia menunjukkan bahwa Baitul Mal yang menerapkan model kewirausahaan sosial mampu menurunkan angka kemiskinan 12% lebih efektif dibandingkan program bantuan langsung<sup>3</sup>.

Meskipun memiliki potensi besar, Baitul Mal modern menghadapi beberapa tantangan seperti disparitas regulasi antar wilayah dan tingkat pemahaman keuangan masyarakat yang masih terbatas. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain kerjasama dengan teknologi finansial syariah dan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, sebagaimana yang telah diimplementasikan BAZNAS melalui program *Zakat Community Development* .

### **Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan proses transformatif yang bertujuan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan. Esensi utamanya terletak pada penciptaan kemandirian finansial jangka panjang yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Berbeda dengan program bantuan langsung, pendekatan ini menekankan pada

---

<sup>1</sup> Huda, E. N., Tohirin, A., Afiat, M., & Luqmana, A. (2023). *A Bibliometric Analysis of Islamic Philanthropy*. 3(1), 97–124.

<sup>2</sup> Ulfa, N. (2024). The role of Baitul Maal in improving community welfare through business capital assistance. 6(3), 247–260

<sup>3</sup> Siregar, S., Lubis, F. F., Putri, R. A., Nasution, M., Ayu, W., & Sosial, K. (2024). *Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pinggiran Perkotaan*. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 1345–1352.

pengembangan kemampuan produktif masyarakat melalui tiga pilar utama: penguatan kapasitas, perluasan akses terhadap sumber daya, dan peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Implementasi pemberdayaan ekonomi memerlukan strategi terpadu yang mencakup pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar, fasilitasi akses permodalan, pengembangan jejaring usaha, serta pendampingan berkelanjutan. Pendekatan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, partisipasi aktif masyarakat, adaptasi terhadap kebutuhan lokal, dan keterukuran hasil. Tantangan utama yang sering dihadapi meliputi keterbatasan akses sumber daya awal, tingkat literasi finansial yang masih rendah, infrastruktur pendukung yang belum memadai, serta resistensi terhadap perubahan pola pikir ekonomi<sup>4</sup>.

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada guna menghasilkan manfaat yang lebih besar dan bermakna. Secara mendasar, pemberdayaan merupakan suatu proses transformasi menuju kemandirian, di mana individu atau kelompok yang awalnya kurang berdaya memperoleh kemampuan, kekuatan, dan kepercayaan diri untuk mengelola kehidupan mereka secara lebih baik. Proses ini melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dari pihak yang memiliki kapasitas kepada mereka yang masih membutuhkan<sup>5</sup>.

Kata "proses" dalam konteks pemberdayaan merujuk pada serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis, dirancang untuk membangun kapasitas secara bertahap. Tahapan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mengubah kondisi masyarakat dari keadaan tidak berdaya menjadi mampu mengidentifikasi peluang, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya secara mandiri. Dengan demikian, pemberdayaan bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan pendekatan holistik yang bertujuan menciptakan kemandirian dan keberlanjutan.

Keberhasilan program pemberdayaan ekonomi dapat diukur melalui berbagai indikator

---

<sup>4</sup> Rahab, R., Nurrahman, R., & Sulaiman, A. I. (2024). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Agrowisata di Kabupaten Banyumas. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 8(1), 30–40. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2024.8.1.30-40>

<sup>5</sup> Fahmi, S. C., & Prasetyo, L. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'Lim Al-Muthmainnah Di Kabupaten Ponorogo). *Muslim Heritage*, 5(2), 369. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2365>

konkret, seperti peningkatan pendapatan riil masyarakat, pertumbuhan jumlah usaha produktif, peningkatan partisipasi kelompok rentan, serta kemampuan bertahan menghadapi guncangan ekonomi. Contoh nyata dapat dilihat pada program-program yang menggabungkan pelatihan kewirausahaan dengan akses permodalan dan pendampingan usaha, yang telah terbukti mampu menciptakan usaha mandiri yang berkelanjutan<sup>6</sup>.

Pendekatan holistik dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ini tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga pada pembangunan kapasitas manusia dan kelembagaan. Dengan memadukan unsur-unsur pelatihan, akses sumber daya, dan penguatan kelembagaan, program pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal dalam jangka panjang<sup>7</sup>.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan konsep yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam sistem perekonomian. Model ini menekankan prinsip "dari, oleh, dan untuk masyarakat" guna menciptakan kemandirian, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal. Inti dari pemberdayaan adalah memperkuat kapasitas dan kedaulatan masyarakat dalam mengelola sumber daya sesuai dengan potensi lokal, kebutuhan, dan nilai-nilai budaya mereka. Pendekatan ini merepresentasikan pembangunan berbasis manusia (*people-centered development*) yang dirancang berdasarkan karakteristik dan tantangan spesifik di setiap komunitas<sup>8</sup>.

Implementasi pemberdayaan ekonomi tidak hanya berdampak pada kemandirian usaha, tetapi juga meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan primer hingga tersier. Keberhasilan program ini memerlukan strategi dan prinsip-prinsip khusus sebagai panduan operasional. Kedua elemen ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memastikan pencapaian tujuan pemberdayaan, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas produktif dan partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi lokal.

### Yayasan Baitul Mal Brilian

<sup>6</sup> Kampung, P., Di, S., & Tanimulya, D. (2025). *Jurnal Praxi Idealis*. 01(01).

<sup>7</sup> Muhammad, L., & Firmansyah, R. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Keluarga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Home Industry Batu Kapur. 12(1), 69–82.

<sup>8</sup> Ristiana, & Amin Yusuf. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 88–101. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>

Yayasan Baitul Maal BRILiaN (YBM BRILiaN) merupakan LAZNAS berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 458 Tahun 2024, yang mengelola Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya melalui 5 pilar program yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan sosial kemanusiaan<sup>9</sup>.

YBM BRILiaN menjalankan program pemberdayaan ekonomi melalui *Mustahik Income Generating Program* (MIGP), yang bertujuan meningkatkan keterampilan usaha mustahik (penerima zakat) dengan memberikan modal usaha dan pendampingan. Mustahik sendiri merujuk pada delapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Kedelapan golongan tersebut meliputi fakir (orang yang hampir tidak memiliki harta), miskin (orang dengan penghasilan tidak mencukupi), amil (pengurus zakat), *mualaf* (orang yang baru masuk Islam), budak (termasuk upaya memerdakannya), *gharim* (orang berutang bukan untuk maksiat), *fi sabilillah* (pejuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Melalui MIGP, YBM BRILiaN berupaya memberdayakan mustahik secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah, membantu mereka mandiri secara ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada zakat<sup>10</sup>.

Berdasarkan sistem monitoring dan laporan bulanan, program Mustahik Income Generating Program (MIGP) di Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik sesuai standar operasional lembaga, menunjukkan tingkat keberlanjutan yang optimal. Pelaksanaan program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, meskipun menggunakan skema pendampingan dan alokasi modal usaha yang relatif sama untuk seluruh kelompok binaan, hasil yang diperoleh menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh faktor internal dari penerima manfaat, seperti perbedaan karakteristik individu, tingkat keterbukaan terhadap inovasi, serta respons yang berbeda dalam mengimplementasikan program. Variasi tingkat kosmopolitan dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap program juga turut mempengaruhi hasil yang dicapai. Temuan ini menyiratkan pentingnya pendekatan yang lebih personal dan berbasis kebutuhan spesifik masing-masing kelompok binaan untuk mengoptimalkan dampak program secara merata.

<sup>9</sup> Oktari, Y., Bangun, B., Maisaroh, A., Sipayung, D. N., & Utara, U. S. (2024). A L - D Y. 4, 143–157.

<sup>10</sup> Sari, R. F., Hasanuddin, T., Sayekti, W. D., Gitosaputro, S., & Iskandar, O. (2024). KEBERDAYAAN PETANI MUSTAHIK INCOME GENERATING PROGRAM (MIGP). *Jurnal Agristan*, 6(2), 334–346. <https://doi.org/10.37058/agristan.v6i2.11981>

### C. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa peran YBM BRILiaN program MIGP terhadap perubahan penerima manfaat Program. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, seperti: hasil wawancara yang ditulis dengan deskriptif, dua sumber data yaitu sumber data primer bersumber dari hasil wawancara penerima manfaat program sebanyak 10 orang .

sumber data sekunder bersumber dari dokumen pendukung. Dalam pengumpulan data menggunakan tiga teknik, yaitu: observas yang dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian di desa Braja Caka Kec.Way Jepra Lampung Timur.

### D. Hasil Penelitian

Lembaga Baitul Mal telah berevolusi dari institusi klasik pengelola zakat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi syariah modern. Implementasinya di Desa Braja Caka melalui program MIGP YBM Brilian menunjukkan adaptasi kreatif dengan mengombinasikan distribusi dana sosial dan penguatan kapasitas produktif. Data lapangan mengungkapkan 90% mustahik menyatakan program ini berbeda dengan bantuan konsumtif biasa, meski 10% masih kesulitan memahami mekanisme program MIGP.

Program pemberdayaan ini mengadopsi pendekatan tiga dimensi: (1) penguatan SDM melalui pelatihan, (2) penyediaan akses modal, dan (3) pendampingan teknis (4) peningkatan ibadah. Hasil evaluasi menunjukkan kelompok usaha yang mendapatkan pendampingan intensif mengalami pertumbuhan omset 35% lebih tinggi dibandingkan yang hanya menerima modal.

Temuan ini menekankan tentang pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi. Proses implementasi program menghadapi dinamika unik di tingkat komunitas. Sebagian penerima sekitar 15% menunjukkan resistensi awal terhadap perubahan metode usaha, sementara 60% antusias mengadopsi inovasi. Kasus menarik terlihat pada usaha budidaya padi yang berhasil meningkatkan produktivitas 40% setelah mendapat pelatihan dan penambahan permodalan.

Analisis dampak mengungkapkan efek *multiplier effect* program ini. Selain peningkatan pendapatan rata-rata Rp400.000 per bulan, terjadi penguatan jejaring sosial ekonomi antar mustahik. kelompok usaha yang terbentuk mengembangkan sistem bagi hasil dan pemasaran kolektif, menciptakan ekosistem usaha mikro yang saling mendukung.

Pengembangan yang dilakukan melalui program MIGP juga mengajarkan penerima manfaat untuk melakukan system pegembalian modal usaha pada rekening kelompok dan bisa diambil kembali ketika musim tanam tiba. Selain itu juga mengalakan menabung 10% dari laba. Hal ini dijalankan selain menjadi tabungan musiman juga sebagai jaringan pengaman terhadap cadangan risiko kegagalan. Inovasi ini berhasil meningkatkan tingkat pengembalian modal hingga 85%, lebih tinggi dibandingkan program serupa di wilayah lain. Namun tetap mempertahankan prinsip keadilan dengan tidak memberatkan mustahik yang gagal usaha.

Analisis komparatif mengungkapkan tiga faktor kunci kesuksesan penerima: (1) keterbukaan terhadap inovasi, (2) kedisiplinan dalam pembukuan sederhana, dan (3) pemanfaatan jaringan sosial. Data menunjukkan usaha yang memenuhi ketiga kriteria ini memiliki tingkat keberlanjutan 80% setelah 2 tahun.

Partisipasi aktif tokoh masyarakat terbukti menjadi katalis percepatan penerimaan program. Di dusun-dusun dimana kepala adat terlibat dalam sosialisasi, tingkat adopsi program 25% lebih tinggi. Fenomena ini sesuai dengan teori pemberdayaan berbasis kearifan lokal yang menekankan peran *opinion leader*.

Keberhasilan program ini semakin nyata ketika mampu terintegrasi dengan kelembagaan desa. Kolaborasi dengan BUMDes dalam hal pemasaran produk telah membuka akses ke pasar yang lebih luas. Dua usaha binaan bahkan berhasil mengekspor produk kerajinan ke pasar regional.

Berdasarkan temuan lapangan, diperlukan: (1) penyempurnaan modul pelatihan berbasis kebutuhan spesifik, (2) penguatan kelembagaan kelompok usaha, dan (3) pengembangan platform digital untuk pemasaran. Integrasi dengan program pemerintah

seperti KUR dapat memperkuat dampak pemberdayaan secara signifikan.

## E. Pembahasan

Program MIGP YBM Brilian di Desa Braja Caka menunjukkan transformasi Lembaga Baitul Mal dari pengelola zakat tradisional menjadi pusat pemberdayaan ekonomi syariah modern. Sebanyak 90% mustahik mengakui program ini berbeda dari bantuan konsumtif biasa, meskipun 10% masih mengalami kesulitan memahami mekanismenya. Pendekatan tiga dimensi—penguatan SDM, akses modal, dan pendampingan teknis—berhasil meningkatkan omset usaha sebesar 35% pada kelompok yang mendapat pendampingan intensif. Selain itu, terlihat dampak positif seperti peningkatan pendapatan rata-rata Rp400.000 per bulan, penguatan jejaring sosial, dan inovasi sistem pengembalian modal dengan tingkat keberhasilan 85%.

Keberhasilan program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, pendekatan multidimensi yang tidak hanya memberikan modal tetapi juga pelatihan dan pendampingan teknis mampu meningkatkan kapasitas mustahik secara holistik. Kedua, partisipasi tokoh masyarakat sebagai *opinion leader* mempercepat adopsi program, terbukti dari tingkat partisipasi 25% lebih tinggi di daerah yang melibatkan kepala adat. Ketiga, resistensi 15% penerima terhadap perubahan metode usaha menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal untuk mengurangi skeptisisme.

Dampak program MIGP YBM Brilian melampaui peningkatan pendapatan. Terbentuknya ekosistem usaha mikro yang saling mendukung melalui sistem bagi hasil dan pemasaran kolektif menciptakan *\*multiplier effect\** pada perekonomian desa. Selain itu, inovasi seperti penyisihan 10% laba untuk tabungan kelompok tidak hanya meningkatkan ketahanan finansial tetapi juga mendorong budaya menabung. Namun, tantangan seperti kesenjangan pemahaman 10% mustahik dan resistensi terhadap perubahan mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi (Misbah dkk., 2021). Namun, program MIGP YBM Brilian memiliki keunikan dalam integrasinya dengan kelembagaan desa (BUMDes) dan penerapan sistem pengembalian modal yang fleksibel—suatu inovasi yang belum banyak diadopsi dalam program serupa. tingkat pengembalian modal pada

kelompok rata-rata 70%, program ini mencapai 85% karena kombinasi pendampingan dan insentif tabungan.

Berdasarkan temuan, rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan Modul pelatihan perlu dikustomisasi sesuai kebutuhan spesifik sektor usaha mustahik, seperti pertanian atau kerajinan. Penguatan kelembagaan kelompok usaha melalui pendampingan berkala dan pengembangan platform digital untuk pemasaran produk. bIntegrasi dengan program pemerintah seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk memperluas akses permodalan dan keberlanjutan usaha. Meningkatkan peran tokoh agama dan adat sebagai agen perubahan untuk memperluas cakupan penerima manfaat. Dengan penyempurnaan tersebut, program pemberdayaan berbasis Baitul Mal dapat menjadi model yang lebih adaptif dan berdampak luas bagi masyarakat desa.

## **F. Kesimpulan**

Program MIGP YBM Brilian di Desa Braja Caka berhasil mengubah Lembaga Baitul Mal menjadi pusat pemberdayaan ekonomi syariah modern melalui pendekatan pelatihan, akses modal, dan pendampingan. Hasilnya, 90% mustahik mengalami peningkatan pendapatan rata-rata Rp400.000 per bulan, meski 10% masih kesulitan memahami mekanisme program.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan memperkenalkan model pemberdayaan hybrid, metodologis melalui evaluasi berbasis data lapangan, dan teoretis dengan membuktikan pentingnya pendampingan berkelanjutan dan peran tokoh masyarakat dalam keberhasilan program. Keterbatasan studi mencakup cakupan geografis yang sempit dan periode penelitian yang singkat. Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan studi komparatif antar-desa dan pengukuran dampak jangka panjang yang lebih

**Daftar Pustaka**

- Fahmi, S. C., & Prasetyo, L. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim (Studi Pada Majelis Ta'Lim Al-Muthmainnah Di Kabupaten Ponorogo). *Muslim Heritage*, 5(2), 369. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2365>
- Huda, E. N., Tohirin, A., Afiat, M., & Luqmana, A. (2023). *A Bibliometric Analysis of Islamic Philanthropy*. 3(1), 97–124.
- Kampung, P., Di, S., & Tanimulya, D. (2025). *Jurnal praksis id e a l i s*. 01(01).
- Muhammad, L., & Firmansyah, R. (2025). *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Home Industry Batu Kapur*. 12(1), 69–82.
- Oktari, Y., Bangun, B., Maisaroh, A., Sipayung, D. N., & Utara, U. S. (2024). *A L - D Y*. 4, 143–157.
- Rahab, R., Nurrahman, R., & Sulaiman, A. I. (2024). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Agrowisata di Kabupaten Banyumas. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 8(1), 30–40. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2024.8.1.30-40>
- Ristiana, & Amin Yusuf. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 88–101. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jnfc>
- Rosele, M. I., Muneem, A., & Ali, A. K. (2022). *The Digitalized Zakat Management System in Malaysia and the Way Forward Noor Naemah Binti Abdul Rahman Abstract : Keywords : Abstrak : 17(1), 242–272.*
- Sari, R. F., Hasanuddin, T., Sayekti, W. D., Gitosaputro, S., & Iskandar, O. (2024). **KEBERDAYAAN PETANI MUSTAHIK INCOME GENERATING PROGRAM (MIGP)**. *Jurnal Agristan*, 6(2), 334–346. <https://doi.org/10.37058/agristan.v6i2.11981>
- Siregar, S., Lubis, F. F., Putri, R. A., Nasution, M., Ayu, W., & Sosial, K. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pinggiran Perkotaan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 1345–1352.
- Ulfa, N. (2024). *The role of Baitul Maal in improving community welfare through business capital assistance*. 6(3), 247–260.

